

# LAPORAN 2008

## Mewujudkan Hak Sosial Masyarakat Miskin Di Tengah Krisis Global



*Sekretariat ASPPUK*

*Jl. Pintu 2 TMII No.37 A RT 015 RW 03, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13560  
Telp./Fax.021-8406172 email:asppuk@indo.net.ud website:<http://www.asppuk.or.id>*

## DAFTAR ISI

<i>Daftar isi</i> .....	3
<i>Latar belakang</i> .....	3
<i>Visi dan misi ASPPUK</i> .....	4
<i>Program Pokok</i> .....	4
<i>Kegiatan Pokok</i> .....	5
<i>A. Memfasilitasi dan menguatkan anggota asosiasi</i> .....	5
<i>A.1 Penguatan ASPPUK Wilayah melalui Pengembangan Sekretariat Wilayah..</i>	5
<i>A.2 Penguatan Manajemen Keuangan Bagi Anggota di NT.....</i>	6
<i>A.3 Workshop dan Training Analisis Sosial .....</i>	7
<i>A.4 Perencanaan program “Pengembangan Usaha Kecil-mikro Sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat” .....</i>	8
<i>B. Penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro).....</i>	9
<i>B.1. Pendampingan PUK dan JARPUK.....</i>	9
<i>B.2 Assesment Pendirian LKP (Lembaga Keuangan Perempuan).....</i>	10
<i>B.3 Monitoring pelaksanaan Lembaga Keuangan Perempuan (LKP).....</i>	10
<i>B.4 . Konsolidasi JARPUK.....</i>	11
<i>B.5 Fasilitasi pengembangan pasar .....</i>	12
<i>B.6 Pelatihan Kepemimpinan .....</i>	13
<i>B.7 Advokasi Kebijakan di Tingkat Kabupaten .....</i>	13
<i>C. Publikasi</i>	
<i>C.1 Pencetakn buku Studi Dampak LKP .....</i>	15
<i>C.2 Mengabarkan Berita PUK-Mikro melalui dunia maya .....</i>	15
<i>D. Advokasi dan networking</i>	
<i>D.1 Tingkat JarpuK; pengembangan Aliansi JarpuK dengan CBO yang lain .....</i>	15
<i>D.2 Tingkat Nasional: merubah pada aras nasional .....</i>	15
<i>E. Pengembangan Kapasitas lembaga .....</i>	16
<i>E.1 Memelihara website dan Pengembangan Sistem database PUK On line....</i>	16
<i>E.2 Fasilitas ICT Dan Pemeliharaan .....</i>	17
<i>E.3. Monitoring JARPUK .....</i>	17
<i>E.4. Monitoring Ornop Anggota .....</i>	17
<i>E.5. Pengembangan Konsep LKP .....</i>	18
<i>E.6. Konsolidasi Internal berupa Perencanaan Strategis Nasional .....</i>	18
<i>E.7. Penyusunan Kode Etik ASPPUK .....</i>	19
<i>F. Jaringan Kerja .....</i>	20
<i>G. Penutup .....</i>	20
<i>Lampiran .....</i>	21

## ***Latar belakang***

Tahun 2008 merupakan tahun ke 4 pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Salah satu *opsinya* di awal tahun 2008, pemerintah mengeluarkan keputusan kenaikan harga BBM. Menurut kebijakan tersebut merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun ditolak berbagai elemen masyarakat, termasuk ASPPUK dan JARPUK. Bersamaan dengannya konversi minyak tanah ke gas elpiji menjadi kebijakan selanjutnya. Kemudian, di paruh kedua, dengan alasan penurunan harga minyak dunia, pemerintah melakukan koreksi kebijakan dengan menurunkan harga BBM pada bulan 15 Desember 2008 – terus diturunkan lagi pada 15 Januari 2009. Sekilas, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah atas rakyat, namun juga dicurigai berbagai pihak penuh dengan muatan politik, yaitu penaikan simpati rakyat untuk PEMILU 2009. Hal ini terlihat dalam iklan kampanye partai pendukung presiden, bahwa penurunan harga BBM merupakan prestasi pemerintah.

Sementara itu, laporan pemerintah RI tentang Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2008, memprediksi dampak kenaikan BBM dan kebijakan pemerintah berdampak kepada kenaikan angka kemiskinan sebesar 15,42 persen penduduk Indonesia – bila diukur dengan USD 1 per hari. Namun bila menggunakan USD 2 per hari, terdapat 48 persen penduduk Indonesia yang rentan terhadap dampak negatif ekonomi dan krisis. Bahkan di daerah yang kurang berkembang, peningkatan angka kemiskinan mencapai antara 30 sampai 40 persen. Sehingga dalam hal itu, krisis sekecil apapun – seperti kenaikan BBM – menyebabkan mereka menjadi miskin. Sementara itu pengangguran di kalangan anak-anak muda khususnya masih tinggi, yaitu hingga Februari 2008, penduduk berusia 15-24 tahun mencapai 22,59% untuk perempuan dan 20,19% bagi laki-laki dengan tingkat pengangguran mencapai 8,5% dari total penduduk.

Bagi perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro), khususnya yang mempunyai usaha makanan olahan, kenaikan BBM di awal tahun -- untuk jenis minyak, dirasakan sangat menghambat usaha. Beberapa PUK-mikro terpaksa harus melakukan perubahan dalam produksi dan pemasaran, sebagian bahkan harus mengambil strategi berhenti untuk sementara waktu, sambil menunggu kestabilan harga, serta sebagian yang lain terpaksa harus tutup karena keterbatasan modal.

Pada akhir 2008 bahkan menginjak awal 2009, meskipun pemerintah RI telah menurunkan harga BBM, namun itu tidak mempengaruhi penurunan harga bahan pokok dan biaya produksi. Sehingga kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2008 merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ekonomi masyarakat, khususnya perempuan usaha kecil. Hal ini diperkeruh dengan hadirnya krisis global, sehingga memperparah daya rentan posisi rakyat -- khususnya perempuan usaha kecil-mikro --, yang menjadi mitra kegiatan ASPPUK.

Selain itu, sepanjang 2008 terdapat kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat khususnya PUK-mikro, yakni UU tentang Penanaman Modal, kebijakan penataan kota dan rehabilitasi pasar di sejumlah daerah yang menggusur lokasi usaha mikro. Di bidang politik, lahirnya UU No. 10 tahun 2008, memberikan angin segar bagi partisipasi

perempuan dalam politik, namun kemudian dianulir MK (Mahkamah Konstitusi), yang secara substansi menciderai upaya *affirmatife action* untuk representasi perempuan.

Dengan kondisi diatas, pengembangan usaha yang diikuti kesadaran hak dan tindakan advokasi, merupakan langkah relevan untuk mendorong penguatan masyarakat sipil. Relevansi yang dimaksud adalah pembangunan gerakan dan peningkatan usaha kecil-mikro merupakan salah satu strategi pengurangan kemiskinan. Dalam situasi social politik yang berubah, hal itu setidaknya memberikan pengaruh terhadap kerja-kerja jaringan ASPPUK di wilayah.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan ASPPUK selama tahun 2008. Semua aktifitas diorientasikan untuk penguatan kelembagaan ASPPUK, yang disertai penguatan ekonomi-politik PUK untuk menanggulangi kemiskinan dan pemiskinan. Secara umum, kegiatan tersebut menjadi bagian *integral* demi terwujudnya *Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender*. Hal ini penting, karena selain ASPPUK *menginisiasi inovasi* lokal dalam pengentasan kemiskinan, juga sebagai penyadaran rakyat bahwa setiap warga berhak atas “kesejahteraan”.

## **Visi & Misi ASPPUK**

### **Visi**

Terwujudnya Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.

### **Misi**

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi.
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

Dalam mewujudkan **Visi** dan mengemban **Misi**, ASPPUK berpegang pada nilai;

- Kesetaraan
- Keadilan
- Kebebasan
- Keterbukaan (*transparancy*).
- Keseimbangan; dan
- Anti kekerasan (*Non Violence*)

## **Program Pokok ASPPUK**

Secara garis besar, ASPPUK mempunyai tiga fokus program, yaitu; *pertama*, penguatan ornop anggota melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, *monitoring* dan studi kebijakan, publikasi, advokasi, pelayanan informasi; *kedua*, penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro) melalui pelatihan, studi banding, pelayanan usaha, studi dan

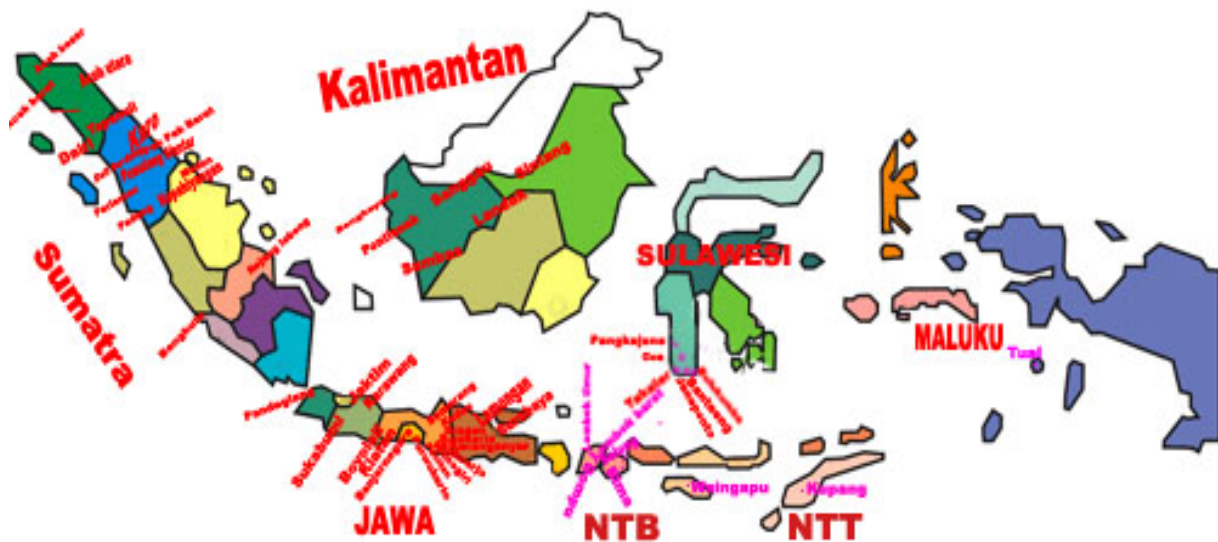
pengembangan jaringan pasar; *ketiga*, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang visi dan misinya selaras dengan ASPPUK.

Dari ketiganya, kegiatan ASPPUK disusun sebagai upaya penguatan PUK-mikro. Semua kegiatan ASPPUK dilakukan melalui; *pertama*, dengan menggalang gerakan PUK-mikro di level *grassroot*; *kedua*, dengan melakukan perubahan kebijakan yang adil bagi PUK-mikro.

### Kegiatan Pokok

- A. Memfasilitasi dan Memperkuat Anggota Asosiasi
- B. Penguatan Perempuan usaha kecil-mikro.
- C. Membangun dan memperkuat Jaringan Pasar bagi Produk PUK-mikro
- D. Publikasi
- E. Advokasi Kebijakan
- F. Networking

### Peta Wilayah Anggota ASPPUK



### Kegiatan Pokok

#### A. Memfasilitasi dan Memperkuat Anggota Asosiasi

Penguatan anggota ASPPUK dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya;

##### A.1. Penguatan ASPPUK Wilayah melalui Pengembangan Sekretariat Wilayah

Sebagai langkah penguatan ASPPUK wilayah, ASPPUK memberikan dukungan berupa support operasional dan fasilitasi akses sumberdaya. Di semester pertama tahun 2008,

asistensi sumberdaya diberikikan kepada wilayah Jawa, yakni keluarnya keputusan pelimpahan pengelolaan kegiatan pengembangan PUK di kab. Bantul Yogyakarta. Melalui aktifitasnya di Bantul, saat ini terbentuk JARPUK Bantul yang terfasilitasi pendirian *showroom* di Kasongan..

Sementara pada semester 2, fasilitasi sumberdaya pengembangan kapasitas ornop anggota dan ASPPUK wilayah diperuntukan bagi Nusa Tenggara dan Sulawesi. Kegiatannya berupa training dan pengelolaan program. Di wilayah Nusa Tenggara, ASPPUK memfasilitasi penajagan kerjasama dengan “ACCES” guna mendapatkan dukungan program pengembangan bisnis dan penguatan kapasitas JARPUK di wilayah Nusa Tenggara (dalam hal ini Lombok Tengah). Disamping itu ASPPUK memberikan kebebasan wilayah untuk pengelolaan LKP, dan membuat sistem standart di tingkat wilayah.

Selanjutnya Seknas memberikan kepercayaan kepada wilayah untuk melakukan akreditasi dan pengembangan kapasitas anggota dalam manajemen keuangan. Dalam hal itu seknas dan sekwil bekerjasama dengan fasilitator “Remdec” melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Seluruh proses asistensi diserahkan kepada wilayah untuk mengkoordinir, sementara seknas berfungsi untuk menentukan standart kriteria sistem dan nara sumber yang memfasilitasi NGO anggota.

Catatannya adalah bahwa kemampuan ASPPUK wilayah, khusus wilayah Sulawesi, untuk mencari pembiayaan kegiatan masih lemah. Oleh karenanya, fokus dukungan ASPPUK Nasional di wilayah Sulawesi lebih pada pemaksimalan kinerja sekretariat wilayah baik dalam mengembangkan LKP yang sudah ada maupun pengembangan *showroom*.

#### ***A.2. Penguatan Manajemen Keuangan Bagi Anggota di NT***

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses akreditasi, dimana beberapa Ornop anggota mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan. Oleh karenanya, ASPPUK memfasilitasi pengembangan manajemen keuangan untuk NGO di wilayah NTB dan Kupang. Kegiatannya difasilitasi konsultan Remdec. Alur kegiatan dimulai dengan pemilihan konsultan oleh ASPPUK dengan pertimbangan kapasitas dan tingkat pengenalan Remdec dengan sistem dan mekanisme keuangan ASPPUK. Selanjutnya asesment oleh konsultan dengan NGO anggota yang menghasilkan kesepakatan tentang materi dan metode asistensi, serta training/asistensi sistem keuangan yang dipilih.

Kegiatan diikuti 4 lembaga yang terdiri dari; LPSDM Lombok Timur, Madafaku dan LPMP dari Dompu serta Bengkel Apek dari Kupang. Lembaga tersebut dipilih, karena mereka belum memiliki sistem komputerisasi keuangan, dan mereka memiliki komitmen untuk menerapkan sistem keuangan yang dipilih, serta bersedia untuk berkontribusi pendanaan (kontribusi untuk menanggung sebagian biaya pembelian sistem).

Dalam proses asistensi keuangan, lembaga mendapatkan fasilitas perangkat lunak tentang sistem keuangan berupa “AKSIS”. Proses asistensi sampai saat ini masih berlangsung, setidaknya beberapa staf lembaga telah merasakan perbedaannya dan memberikan

komentar yang positif ‘ *wah....nanti kalau sistem ini sudah diterapkan dengan betul, pekerjaan saya akan semakin mudah...., membuat laporan tidak manual lagi.....* ’, begitu ungkap **Muslihatun** dari Lotim. Selanjutnya, secara bertahap ASPPUK mengupayakan penggunaan sistem tersebut untuk lembaga anggota lainnya agar proses mewujudkan auntabilitas kelembagaan di lingkungan ASPPUK bisa terbantu.

### ***A.3. Workshop dan Training Analisis Sosial***

Kegiatan ini merupakan lanjutan rekomendasi jaringan SCDF, dan dikukuhkan dalam keputusan FORNAS februari 2008 ASPPUK, yaitu tentang model pengorganisasian dan arah gerakan PUK. Kegiatan workshop dilakukan di 3 ASPPUK wilayah. Kegiatan pertama dilakukan di wilayah Jawa, dan dilakukan di sulawesi pada 21-23 September 2008 dan Nusa Tenggara pada 22 – 25 November 2008. Proses kegiatannya diawali dengan asesment narasumber dan JARPUK kepada jarPUK sebagai sampel dimana hasilnya dipresentasikan dalam workshop yang diikuti JARPUK dan NGO pendamping. Dalam wokrshop dilakukan klarifikasi, diskusi dan analisis bersama, dan narasumber memberikan rekomendasi pengembangan gerakan sebagai perencanaan NGO dan JARPUK.

Dalam pelaksanaannya tidak semua JARPUK dalam satu wilayah terlibat. Di Jawa, JARPUK Purwokerto dengan spesifikasi produk pertanian, JARPUK Kudus dengan produk kerajinan bordir dan makanan serta JarPUK Solo dengan perdagangan, serta Pacitan sebagai sampel. Disamping 3 JARPUK tersebut, ada JarPUK Surabaya dan Pacitan yang melakukan sebelumnya, juga dihadirkan untuk sharing perkembangan kegiatannya. DI wilayah NT, asesment dilakukan di JARPUK Lombok Timur dengan fokus produk tenun, dan Lombok Tengah dengan tenun dan kerajinan rotan sebagai analisisnya. Di wilayah Sulawesi, asesment dilakukan di JarPUK Gowa dan Takalar dengan produk pertanian dan lingkungan pesisir.

Darinya diketahui bahwa ada kompleksitas masalah JARPUK dalam pengembangan bisnis dan advokasi yang meliputi aspek sisial budaya dan ekonomi, produktifitas, dan kelangsungan layanan alam. Dari aspek sosial budaya dan ekonomi, dari mayoritas 65 JARPUK yang tersebar di 65 kabupaten/kota masih mengalami perlakuan diskriminatif, masalah kesehatan reproduksi dan buruknya gizi bayi dan ibu hamil, di beberapa wilayah ada perdagangan anak, polusi udara, limbah serta pengusuran, salah satu contohnya; JarPUK surabaya, Kendari, dan pulau Lombok. Sementara di aspek produktifitas, JARPUK semua wilayah mengalami rendahnya mutu produksi, kelangkaan bahan baku dan pendukung yang berimplikasi biaya produk dan harga jual mahal, sehingga terancam oleh produk daerah atau negara lain yang lebih murah. Kondisi itu diperparah dengan rendahnya ketrampilan produksi dan manajemen PUK dan keterbatasan penguasaan tehnologi, seperti di Pacitan dan Sukoharjo, bahan baku untuk produksi makanan olahan (gula jahe, kecap wijen) dan benang untuk bordir di Kudus, dan rotan untuk kerajinan Ketak di Lombok Barat. Selanjutnya dalam **Kelangsungan layanan alam** diidentifikasi adanya masalah penebangan hutan, banjir, sulitnya air, polusi udara sebagai akibat proses industri yang mengakibatkan masalah kebijakan pemerintah dan penguasaan pemilik modal besar.

Hasilnya ada pemetaan yang berdasarakan pembagian wilayah kerja dimana urusan produktifitas menjadi tanggung jawab PUK, dan urusan keselamatan rakyat menjadi tanggung jawab bersama PUK dan kelompok, serta untuk urusan keberlanjutan layanan alam menjadi tanggungjawab JARPUK dan pendamping untuk mendesakan perubahan.

Dari hasil analisis sosial diatas menguatkan hasil diskusi dalam FORNAS, dan semakin relevan bagi ASPPUK untuk merubah dan menerapkan strategi baru yang tepat dan efektif untuk pengembangann usaha dan gerakan. Refleksinya, hingga akhir tahun 2008 ASPPUK masih kesulitan untuk mengatasi problem tersebut. Meskipun telah dipetakan masalah dan solusi serta kerja-kerja elemen di ASPPUK, namun hal itu belum mengalami perkembangan. Hal itu terjadi karena akar masalah sebagian besar terletak pada komponen aktifitas anggota, sementara kebanyakan anggota masih menghadapi masalah sustainabilitas kelembagaan. Dari 11 JarpuK yang telah diasesment dan mendapatkan masukan, mereka bersedia melanjutkan kegiatan belajar bersama, disertai pendamping di wilayah masing-masing. Gambaran itu semua menjadi catatan penting bagi ASPPUK untuk penyusunan strategi program di tahun depan.

#### *A.4. Perencanaan program “Pengembangan Usaha Kecil-mikro Sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat”*

Pada tahun 2008, ASPPUK dengan dukungan Hivos memulai program “*pengembangan usaha kecil-mikro sebagai kekuatan rakyat*”. Program ini merupakan refleksi dari agenda ASPPUK yang tertunda sejak beberapa tahun silam, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha PUK dan JARPUK secara integratif.

Program ini dimulai dengan perencanaan kegiatan program yang dihadiri pengurus JARPUK dari kota Padang Sumatera Barat, kota Solo, Kab. Sukoharjo, kab. Kudus, Jawa Tengah, dan perwakilan JARPUK dari 4 kabupaten di Kalimantan Barat. Selain JARPUK, perencanaan juga dihadiri staf pendamping dan pengurus KEN ASPPUK serta staf seknas ASPPUK. Jumlah semua peserta sebanyak 30 orang. Workshop dilaksanakan di Wism YIS, Solo, pada akhir Desember 2008 selama 4 hari.

Semua yang berkaitan dengan pelaksanaan program dibahas secara mendalam dalam worshop perencanaan, termasuk strategi dan capaian yang diharapkan dari program selama 3 tahun. Adapun hasil yang dicapai dari workshop perencanaan program *pengembangan usaha kecil-mikro sebagai kekuatan rakyat*”, adalah; *pertama*, terususunya alat untuk melakukan assessment PUK dari JARPUK yang menjadi fokus program, *kedua*, tersusunya logical frame works (logframe) program beserta indikator capainya, *ketiga*, terususnya konsep monitoring yang disepakati, *keempat*, adanya komitmen NGO anggota yang terlibat dalam program secara profesional, yaitu dengan menjadikannya sebagai BDS – tertulis dalam SPK –, *kelima*, disepakainya waktu untuk melakukan assessment. Semua hasil tersebut dilakukan secara bersama dan partisipatif antara NGO pendamping, pengurus ASPPUK dan pengurus JARPUK. Sehingga perencanaan tersebut menjadi kerja bersama.



## **B. Penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro)**

### *B.1. Pendampingan PUK dan JARPUK*

Penguatan PUK dan JARPUK dilakukan berkelanjutan melalui pendampingan PUK yang terintegrasi dalam program ornop anggota. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab NGO dan JARPUK untuk beberapa kegiatan dilaksanakan bersama, serta ASPPUK wilayah. Secara umum, pendampingan NGO anggota kepada PUK diarahkan untuk peningkatan usaha, pengembangan diri dan organisasi JARPUK. Disamping itu, NGO juga mendampingi LKP sebagai pendukung pengembangan usaha dan gerakan PUK.

Hingga saat ini, kegiatan pendampingan dilakukan oleh anggota di setiap wilayah dengan intensitas yang beragam. Untuk NGO yang memiliki dukungan program berkelanjutan, maka pendampingan dilakukan intensif, seperti terlihat pada JARPUK di wilayah Jawa, yakni; Solo, Sukoharjo dan Klaten. Di wilayah ini perkembangan PUK bergerak naik, baik secara pribadi, usaha dan posisinya dalam masyarakat. JARPUK Klaten, Solo dan Sukoharjo lebih aktif dalam kegiatan advokasi. Di Klaten dan Solo lebih banyak mencermati anggaran pembangunan daerah, sedangkan untuk Sukoharjo lebih pada pembuatan PERDA (peraturan daerah) yang mendukung UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Untuk wilayah lain, pendampingan pada aspek bisnis mengalami hambatan. Selain karena adanya kenaikan BBM, fasilitasi bisnis secara bersama sulit dilakukan karena heterogenitas usaha dan berskala mikro. Hal ini merupakan permasalahan lama bagi ASPPUK, namun sulit teratasi karena keterbatasan kapasitas NGO dalam penyediaan staf pendamping. Pelatihan pendampingan yang dilakukan ASPPUK tahun lalu dirasakan manfaatnya, namun karena keterbatasan sumberdaya di masing-masing NGO, maka staf yang terlatih sulit dipertahankan untuk satu program. Makanya ke depan, ASPPUK mendukung pengembangan staf melalui training dan menstrukturkan pengalamannya menjadi panduan tentang metodologi pendampingan yang operasional.

Sementara hambatannya, pendampingan NGO tidak hanya menghadapi problem bisnis, namun merasakan masalah advokasi. Kesulitan tersebut disamping kapasitas NGO dan konsistensinya dalam aktifitas advokasi, juga dipengaruhi penurunan semangat rakyat.

Pengalaman ASPPUK untuk menemukan strategi dan model, khususnya dalam mendorong pengalaman wilayah untuk pengelolaan program, dirasa belum cukup. Oleh karenanya untuk mendorong efektifitas pendampingan, ASPPUK mengembangkan pilot model. Pilot model yang dimaksud adalah pendampingan dengan strategi yang komprehensif dengan memiliki sensitivitas pengembangan bisnis yang terfokus. Program ini dilaksanakan di 5 JarPUK di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi dan telah mendapatkan komitmen Hivos di tahun 2009, dan diharapkan bisa dikembangkan untuk wilayah lainnya.

### *B.2. Assesment Pendirian LKP (Lembaga Keuangan Perempuan)*

Kegiatan assessment pada tahun 2008 dilakukan untuk 3 JARPUK di 2 wilayah, yakni Jawa dan Nusa Tenggara, dimana hal itu terlaksana pada semester kedua, yakni di Kota Semarang dan Kab. Wonogiri (Jawa) serta Kota Kupang (NTT). Khususnya untuk wilayah Kupang dan Wonogiri, pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada bulan Desember 2008, karena sebenarnya alokasi ini untuk wilayah Sulawesi.

JARPUK Kupang mengalami hambatan karena ASPPUK harus menyeleksi calon NGO Pendamping. Sementara itu LKP kota Semarang dan kab. Wonogiri telah melakukan pelayanan kredit dengan menggunakan modal swadaya sebelum adanya dana stimulan. Namun begitu, pemberian dana stimulant untuk dua wilayah terakhir tidak langsung dilakukan, karena berdasarkan hasil assessment merekomendasikan LKP dua wilayah untuk melengkapi beberapa persyaratan administratif seperti; data base anggota, merapikan sistem layanan, menyepakati sistem pengorganisasian di tingkat kelompok, perbaikan struktur JARPUK, serta peran penting pendamping.

Penyiapan LKP kota Semarang membutuhkan perhatian khusus, karena LKP yang dibentuk merupakan penggabungan KPUK (sebelumnya berbentuk Koperasi), sehingga perlu direvitalisasi dengan penambahan anggota baru dari kecamatan lain. Oleh karenanya, hasil assesment merekomendasikan pembuatan kesepakatan dan aturan tertulis tentang penggabungan aset dan layanan anggota, serta strategi perekrutan anggota.

Kelambatan proses ini mengganggu rencana JARPUK dalam merealisasikan dana, mengingat pengajuan bertepatan dengan waktu dimana kebutuhan terhadap penambahan modal maupun belanja meningkat hampir dua kali lipat (yaitu hari Raya Idul Fitri). Sehingga dalam hal ini ASPPUK dan pendamping bekerja hati-hati supaya tidak terjadi penyalahgunaan kredit untuk konsumtif. Disamping itu, ASPPUK telah belajar dari pengalaman bahwa sebagian besar LKP yang bermasalah, disebabkan minimnya persiapan kelembagaan.

### *B.3. Monitoring Pelaksanaan LKP*

Sampai akhir Desember 2008, jumlah LKP yang difasilitasi pembentukannya berjumlah 22 buah. Dari pemantauan yang dilakukan Seknas dan Sekwil, secara umum perkembangannya cukup baik, dalam artian kegiatan simpan pinjam masih berjalan, dan memberikan kemanfaatan bagi anggota. Namun demikian perkembangannya tidak merata, terkait dengan faktor kemampuan pengelola maupun intensitas pendampingan oleh NGO.

Kondisi LKP di sejumlah daerah beragam, ada beberapa LKP yang mempunyai modal kurang dari Rp 50.000.000, karena beberapa alasan, seperti yang terjadi di LKP Bima. LKP ini didampingi langsung ASPPUK Wilayah dengan pengucuran dana dilakukan ketat sesuai permohonan LKP, sehingga tidak memungkinkan dan berhenti di kas LKP. Secara umum, tingkat kemacetan LKP masih ditoleransi, namun secara ekonomis perkembangan LKP belum menunjukkan hasil yang maksimal dari sisi perputaran modal. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa alasan; *pertama*, LKP memiliki

keterbatasan kemampuan dalam strategi pemasaran dan pelayanan yang berorientasi profit. *Kedua*, LKP lebih berorientasi pada pemerataan layanan dan menjaga relasi/kebersamaan kelompok. *Ketiga*, kapasitas pengelola yang memang belum cukup memadai. *Keempat*, kehati-hatian pengurus LKP dalam penyaluran dan pengelolaan modal LKP, termasuk dalam penarikan tabungan anggota sehingga LKP mengalami kekuarangan likuiditas, dsb.

Terhadap permasalahan tersebut, ASPPUK berinisiatif mendorong LKP yang sudah siap untuk membentuk organisasi payung di tingkat Nasional. Organisasi ini diharapkan secara fokus berfungsi untuk pengembangn kapasitas dan menjalankan fungsi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pengembangan modal antar LKP. Bentuk hukumnya adalah Koperasi simpan pinjam. Dengan adanya koperasi skunder di tingkat nasional diharapkan ASPPUK memiliki fokus perhatian keahlian dalam pengembangan keuangan mikro dengan perspektif gender.

Namun begitu, keberadaan LKP secara kelembagaan dan substansial memberikan makna bagi PUK. LKP mampu mendorong pertumbuhan organisasi JARPUK dan bahkan dalam upaya meningkatkan ekonomi anggota. Studi dampak yang dilakukan ASPPUK menunjukkan bahwa LKP memberikan dampak pada 4 level cakupan yakni level Individu pengguna, usaha PUK, rumah tangga dan level komunitas. Sebagai contoh dalam rumah tangga, dialami **Nahrim**, warga Kebon Talo, Selong dan anggota LKP Titian (Lotim). Sebelumnya ia mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 500.000 setiap bulan dari usaha jualan di kantin sekolah, sekarang ia mampu mendapat keuntungan Rp. 110.000 setiap hari berkat modal LKP, sehngga membantu perekonomian keluarganya. Kisah serupa dialami bu **Sri Handayani**, anggota LKP Solo, seperti diungkap, “*LKP dan JARPUK Solo adalah keluarga saya. LKP dan JARPUK merupakan tempat saya berjuang bersama untuk memperoleh hak, sekaligus tempat untuk saling membantu satu sama lain. Bagi saya, LKP pula yang telah membantu saya meningkatkan kembali skala usaha perlahan-lahan seperti sedia kala sebelum kebakaran*”.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa LKP memberikan dampak kesejahteraan bagi keluarga. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung diperolehnya melalui akses terhadap layanan LKP. Dampak langsung misalnya melalui penggunaan dana LKP untuk meningkatkan usaha dan memperoleh peningkatan pendapatan sehingga mampu memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dalam konteks itu, dampak tidak langsungnya adalah kemampuan PUK dalam menyekolahkan anak-anaknya.

#### *B.4. Konsolidasi JARPUK*

Konsolidasi JARPUK dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2008. Kegiatan Konsolidasi secara umum dilakukan dengan alur kegiatan sebagai berikut; masukan narasumber, refleksi kondisi setiap JARPUK kabupaten, analisis umum tentang masalah dan peluang, dan diakhir ada penyusunan agenda bersama, serta perencanaan masing-masing JARPUK. Dalam hal itu, wilayah Jawa menghadirkan 3 (tiga) narasumber dari akademisi dan KPUD kota Solo, yang berbicara; isu ekonomi global, masalah usaha dan proyeksi politik 2009. Sementara itu, wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara menghadirkan narasumber yang sama, yaitu Hendro Sangkoyo. Selain membantu NGO di dua wilayah

dalam kegiatan analisis sosial, ia juga memberikan gambaran tentang tantangan JARPUK sesuai hasil analisa sosial yang telah dilakukan di masing-masing wilayah.

Dari analisis sosial terlihat adanya ancaman bagi PUK dari berbagai aspek baik ekonomi maupun politik, tetapi kemampuan internal JARPUK umumnya lebih banyak memberikan respon untuk masalah ekonomi yang lebih praktis. Sementara dalam masalah politik dan lingkungan, terlihat bahwa tantangannya ke depan masih sulit ditemukan solusinya. Kesulitan ini berkaitan dengan kompleksnya masalah yang dihadapi, terbatasnya kemampuan analisis pengurus maupun pendamping, serta tingkat kesadaran anggota JARPUK di masing-masing wilayah yang masih beragam.

Diantara rencana tindak lanjutnya; *pertama*, dalam kelembagaan perlu ada; Sosialisasi visi-misi JARPUK secara internal dan eksternal, Pertemuan rutin pengurus JARPUK, Pertemuan JARPUK dgn pendamping, Penarikan Iuran JarPUK (simpanan pokok dan wajib), Memotivasi Anggota JarPUK untuk menabung, Konsolidasi jarPUK wilayah dan Nasional, Akreditasi anggota JarPUK, Pengembangan manajemen LKPUK, Monitoring dan Evaluasi anggota JarPUK. Kedua, pengembangan pasar, yaitu; Mencari peluang pasar, Mendirikan showroom dan promosi. Ketiga, dalam pengembangan manajemen usaha, yaitu; pelatihan manajemen usaha pada tiap kelompok, Pelatihan analisis usaha. Keempat, dalam advokasi kebijakan, yaitu; Lobby dan Hearing untuk isu anggaran, Akses dana ke Koperasi, Isu kesehatan, lingkungan, Hearing ke DPRD dan pemda tentang isu KDRT dan Pelecehan sexual serta pemindahan pasar, pelatihan kepemimpinan Perempuan, Aksi Penghijauan.

#### *B.5. Fasilitasi Pengembangan Pasar*

Kegiatan pengembangan pasar dilakukan di tingkat wilayah dan nasional, untuk tingkat wilayah, kegiatan pemasaran merupakan lanjutan kegiatan tahun sebelumnya, yakni penjualan langsung melalui aktivitas di *showroom*. Saat ini, showroom Jawa dan Sulawesi sudah berjalan, sedangkan di NT sedikit mengalami hambatan karena belum ada pengelola yang permanen, namun telah dilakukan penataan dan kini telah ada petugas khusus.

Di tingkat nasional, fasilitasi pasar dilakukan dengan 2 cara; yakni melalui promosi lewat elektronik dan melakukan *display* produk di sekretariat, serta memfasilitasi penjualan/pengiriman produk PUK antar wilayah. Walaupun tidak terlalu banyak, sampai saat ini penjualan produk di tingkat nasional telah mengalami peningkatan, yaitu diantaranya dalam bentuk pengiriman ke JARPUK Kendari, PUK di Sulawesi dan Dompu, serta dibawa oleh rekanan bisnis (PUK maupun NGO ).

Fasilitasi pengembangan pasar secara nasional dirasakan belum maksimal karena masih bersifat menunggu, belum ada rencana pengembangan pasar secara aktif, baik dalam bisnis riil maupun penawaran melalui elektronik. Kelemahan sisi pemasaran ini dikarenakan memang belum ada divisi khusus untuk pemasaran di tingkat nasional, sehingga kegiatan dilakukan insidental dengan memaksimalkan staf sekretariat yang ada. Strategi pengembangan pasar yang dimaksimalkan di tahun berikutnya adalah penjualan

langsung untuk produk-produk unggulan wilayah, dengan memaksimalkan promosi melalui media maupun mencari pelanggan langsung.

#### *B.6. Pelatihan Kepemimpinan*

Kegiatan ini berupa pelatihan kepemimpinan sebagai bekal pengurus dan calon pengurus JARPUK dalam pengorganisasi di masyarakat – khususnya menyikapi PEMILU 2009 dengan cerdas. Oleh karenanya kegiatan ini memberi masukan JARPUK yang akan menjadi caleg. Secara umum, pelatihan memberikan pembekalan perspektif kepemimpinan perempuan, yang berorientasi pada perubahan dan nilai-nilai yang mengedepankan dialog dan menghargai hak asasi serta kesetaraan. Kegiatan dilaksanakan antara tgl 21- 23 Nopember 2008, dan dihadiri 20 pengurus JARPUK dari berbagai kabupaten di 3 wilayah.

Pelatihan ini juga didasari pemikiran bahwa pemahaman selama ini kepemimpinan identik dengan laki-laki yang mempunyai ciri-ciri berwibawa, kuat dan pintar, dan duduk di lembaga formal serta mempunyai massa luas. Dalam hal itu, peserta merumuskan alternative kepemimpinan yang tidak selalu berperspektif maskulin dengan mengedepankan perspektif feminis, seperti pengedepanan cara-cara persuasif, dialog, lebih banyak mendengarkan, memilih kata-kata yang tepat dan tidak kasar, serta tidak merendahkan masyarakat dan menjunjung nilai-nilai keadilan gender.

Pengurus JARPUK mendapatkan manfaat pelatihan, khususnya bagi anggota yang maju dalam pencalonan legeslatif. Mereka terbekali dengan kemampuan kepemimpinan khususnya untuk komunikasi dan gaya kepemimpinan. Hal itu, diungkap **ibu Marta**, *jarpuK Inafao* di akhir pelatihan “ *saya benar-benar terkesan dengan pelatihan kepemimpinan, saya merasa ada penambahan wawasan, khususnya menjadi pemimpin perempuan..., sangat bermanfaat, saya lebih tahu bagaimana bersikap sebagai pemimpin dalam memecahkan masalah...terima kasih sekali kesempatan ini.*”.

Pelatihan kepemimpinan dengan mengakomodasi situasi makro nasional merupakan hal positif. Apalagi pelatihan tersebut sesuai dengan perencanaan awal yaitu tentang kepemimpinan. Pekerjaan yang tertinggal bagi JARPUK adalah mengevaluasi implementasi hasil-hasil pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan sebagian kader JARPUK dalam pencalegan di Pemilu legeslatif.

#### *B.7. Advokasi Kebijakan di Tingkat Kabupaten*

Kegiatan advokasi yang dilakukan merupakan lanjutan aktifitas sebelumnya. Kondisi advokasi JARPUK berbeda antara satu kabupaten dengan yang lain. Terdapat JARPUK yang belum intensif melakukan advokasi namun lebih banyak melakukan pengembangan bisnis. Sedangkan untuk JARPUK yang rutin melakukan advokasi, saat ini mereka berminat mendapatkan posisi startegis dalam wilayah publik, dan beberapa mendapatkan tawaran partai Politik. Diantara kader JARUK yang masuk dalam wilayah politik praktis berjumlah 13 perempuan dari kab. Gowa, Sukoharjo, Semarang, Banyumas, Dompu, Bima, Kupang dan Atambua.

Advokasi pada tahun 2008 masih pada fokus tentang APBD, khususnya alokasi untuk hak-hak dasar masyarakat dan peningkatan partisipasi JARPUK dalam proses kebijakan. Kegiatan ini dilakukan JARPUK kota Solo, kab. Kendari, kab. Gowa, Lombok Timur, dan pada semester ke dua JARPUK Kupang dan Jakarta mulai aktif dalam advokasi pengkritisan terhadap RAPBD. Sementara JARPUK Jakarta bersama aliansi masyarakat yang bernama “GARAP” (gerakan rakyat anti pemiskinan) Jakarta, melakukan advokasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat miskin dalam anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Secara rinci, pada tahun 2008 JARPUK bersama NGO pendamping dalam aliansi GARAP melakukan advokasi kebijakan public, khususnya untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dengan mengawal penyusunan RAPBD hingga tahap penyusunan kegiatan di RASK dan lobbiving dalam pembahasan RAPBD di gedung DPRD akhir Desember 2008. Melalui beberapa anggota DPRD periode 2004-2009, kritikan aliansi diterima dalam hearing pembahasan RAPBD. Selain hearing dengan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2009, aliansi diundang pemerintah daerah DKI Jakarta untuk membahas perbaikan penyusunan program khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam rapat internal pemerintah kota setelah pembahasan RAPBD dengan DPRD.

Analisis yang dilakukan aliansi Jakarta tersebut antara lain minimnya anggaran untuk pendidikan yang lebih besar untuk biaya operasional diknas dan alokasi gaji guru, tingginya biaya pembelian peralatan yang digunakan dewan melebihi harga pasar, minimnya alokasi dana kesehatan yang diperuntukan untuk warga miskin Jakarta, dsb. Seperti dalam hal itu, alokasi untuk pelantikan mencapai Rp 908 juta, pembiayaan penulisan sambutan gubernur dan wakilnya sebesar Rp 1,6 milyar, biaya SMS gubernur kepada masyarakat mencapai 1,8 milyar, pengiriman guru ke New Zeland menelan 1,8 milyar.

Walaupun keterlibatan aliansi di proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah khusus Jakarta intensif, tetapi dokumen RAPBD yang diperbaiki Gubernur DKI tetap tidak sesuai harapan aliansi dan JARPUK. Sebagai langkah terakhir advokasi, GARAP menyusun kertas posisi yang berisi masukan dalam penyusunan RAPBD yang disampaikan kepada departemen dalam (Depdagri) sebagai instansi terakhir yang memeriksa dan menyetujui dokumen RAPBD (*“The Jakarta Post”, tanggal 4 Desember 2008 dengan judul, “Jakarta’s Budget Too Lavish: NGO’s”*)

Sementara di tempat lain, advokasi PERDA Tata Kota untuk menghambat maraknya pasar modern yang dilakukan JARPUK Sukoharjo dianggap kurang strategis. Oleh karenanya, seknas merekomendasikan untuk melakukan analisis mendalam tentang kebijakan penanaman modal daerah. Dalam hal itu, JARPUK Sukoharjo mengusulkan anggaran untuk program pengembangan PUK dan penanganan masalah Kekerasan terhadap perempuan. Menurut pantauannya masalah kekerasan mengalami kenaikan pada semester kedua 2008 namun masyarakat belum paham terhadap masalah ini. JARPUK bersama NGO melanjutkan kajian untuk menemukan akar masalah kebijakan yang efektif untuk dipengaruhi maupun dirubah agar menjamin pengembangan usaha kecil-mikro di Sukoharjo.

## **C. Publikasi**

### *C.2. Mengabarkan Berita PUK-mikro Melalui Dunia Maya*

Semenjak ASPPUK meluncurkan website pada tahun 2003, media ini membantu peran jaringan. Apalagi Indonesia terdiri dari gugusan pulau yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk merangkai jalinan komunikasinya. Berkenan dengan itu, sekretariat nasional ASPPUK sebagai lokus jaringan, menata sistem informasinya dengan mengembangkan website ASPPUK dengan menambah sejumlah *display* produk.

Selain fungsi informasi, *web-site* yang diharapkan menjadi media promosi produk, belum berjalan dengan lancar karena up-date gambar produk dari anggota lambat diakses, khususnya produk yang belum disertai katalog/informasi produk. Kendala ini diharapkan bisa di atasi, karena ASPPUK sedang melakukan pendataan ulang terhadap identitas PUK sekaligus produknya. Disisi lain ASPPUK di tiap-tiap wilayah saat ini telah membangun *show room*, diharapkan informasi produk yang ada di showroom tersebut dalam di akses langsung melalui web- ASPPUK.

## **D. Advokasi dan Networking**

### *D.1. Tingkat Jarpuk; pengembangan Aliansi Jarpuk dengan CBO yang lain*

Pemeliharaan aliansi antara JarPUK dan masyarakat sipil yang lain, tetap dilakukan oleh Seknas ASPPUK, melalui penyebaran informasi tentang perkembangan dan isu yang ada di wilayah masing-masing. Namun demikian untuk mobilisasi aliansi di tingkat nasional, pada tahun ini mengalami kesulitan, beberapa aksi di tingkat nasional terpaksa tidak menghadirkan JarPUK dari luar jakarta karena keterbatasan dana.

Isu yang disikapi ASPPUK, bersama JarPUK dan aliansi masyarakat sipil yang lain adalah tentang UU- PMA, dimana perubahan UU tersebut tidak total sebagaimana diperjuangkan aliansi gerak lawan. Penolakan terhadap kenaikan BBM dan listrik serta privatisasi pendidikan. Isu lain yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil di jakarta adalah tentang partisipasi dan alokasi anggaran bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini ASPPUK memfasilitasi aliansi antara JarPUK

### *D.2. Tingkat Nasional*

Analisa kebijakan di tingkat Nasional juga dilakukan ASPPUK secara khusus memfasilitasi JARPUK untuk bersama melakukan gugatan atas Undang-Undang Penanaman Modal, kegiatan ini beraliansi dengan serikat Petani, Buruh dan Perempuan, dengan pusat aktifitas di Jakarta.

Selain kegiatan diatas pada aras nasional advokasi juga muncul, seperti;

1. Keterlibatannya sekretariat nasional dalam pengkritisan RAPBN 2009, yang beserta masyarakat sipil lainnya melakukan analisis anggaran nasional pada bulan November dan Desember 2008.

2. Aktif dan berpartisipasi dalam advokasi masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dalam hal itu, ASPPUK juga menjadi anggota aktif dalam Koalisi masyarakat sipil untuk MDGs.
3. Secara aktif, ASPPUK juga terlibat dalam *E-net fo Justice (Education Network)*, yaitu jaringan nasional yang memperjuangkan pendidikan untuk keadilan di Indonesia. Dalam hal itu, ASPPUK terlihat aktif untuk mengkritisi sistem pendidikan Indonesia yang sudah mengarah kepada “komersialiasi” sebagai efek dari “privatisasi” negara.
4. Aktif dalam bersama NGO lain mengajukan “judicial review” atas UU penanaman modal asing yang tidak berpihak kepada rakyat.

## **E. Pengembangan Kapasitas Lembaga**

### *E.1. Memelihara website dan Pengembangan Sistem database PUK On line*

Keberadaan website sebagai sarana pendukung pengembangan usaha tidak lagi diragukan. ASPPUK menyadari peran penting teknologi ini. Untuk itu tahap demi tahap ASPPUK berkepentingan untuk mengembangkannya, baik dari aspek tampilan dan fasilitas website. Dalam hal ini, pengembangan website ASPPUK telah sampai pada tahap penyiapan konten yang mendukung pada teknologi web yang berbasis e-commerce. Meskipun pada tahun lalu website telah mampu menampilkan foto produk (Display product), akan tetapi hal ini terus dikembangkan dengan menambah fasilitas pendukung yang memudahkan komunikasi antar pihak (user website).

Kendala yang cukup berarti dalam pengembangan website berbasis e-commerce di antaranya masih belum konsistennya jejaring ASPPUK yang menyediakan informasi produk (Foto, harga produk, dan deskripsi produk). Untuk mengatasi kendala ini, Seknas ASPPUK dan jejaringnya telah melakukan pendataan tentang kekayaan produk PUK, khususnya produk unggulan PUK.

Terkait dengan kegiatan pendataan ini, untuk memudahkan kerja bersama baik seknas dan jejaring ASPPUK di wilayah, maka ASPPUK mengembangkan software database yang telah ada, baik aspek instrumen/konten dan teknologinya. Secara teknologi system data base ini telah dikembangkan ke arah on line.

Pengembangan Database Software, saat ini pada tahap penyusunan instrumen/konten dan pembuatan sistem manajemen informasi (MIS). Pada prinsipnya pengembangan database ditujukan untuk penyediaan data yang mendukung Website e-commerce ASPPUK. Di samping itu database ini berperan dalam membantu kerja organisasi ASPPUK dan jejaringnya.

Kendala lain, selain dukungan data dari wilayah, yaitu masih terbatasnya kapasitas di Sekretariat Nasional dalam mengawal, mengembangkan, dan memelihara website yang berbasis e-commerce. Untuk mengatasi kendala ini sumber daya yang ada Seknas ASPPUK bekerja sama dengan mitra ASPPUK yang bersedia membantu pengembangan ICT ASPPUK. Salah satunya, ASPPUK menjalin networking dengan komunitas Satu



Dunia, dan ICT Hivos trajectory, dan ICT-Coops Formasi Indonesia. Manfaat yang telah diambil dari networking dengan komunitas ICT ini, ASPPUK Seknas telah mengupayakan peningkatan kapasitas ICT anggota, melalui pelatihan ICT, khususnya pengetahuan website kepada beberapa anggota ASPPUK, meskipun masih melibatkan peserta yang masih terbatas.

### *E.2. Fasilitas ICT Dan Pemeliharaan*

Sebagai pendukung untuk kelancaran kerja-kerja bidang ICT, utamanya pendukung kemampuan website e-commerce yang terus dikembangkan saat ini, ASPPUK telah meningkatkan jaringan koneksi internet dengan teknologi ADSL. Kondisi ini berdampak pada proses komunikasi lebih lancar dan akses yang menjangkau seluruh staf seknas. Terlebih-lebih saat ini Seknas telah memasang fasilitas hotspot di salah satu sudut ruangan seknas ASPPUK. Fasilitas hotspot dirancang untuk menyediakan fasilitas internet kepada setiap tamu yang hadir di sekretariat nasional ASPPUK, khususnya anggota ASPPUK.

Sebagai konsekwensinya peningkatan tagihan biaya koneksi internet, karena perubahan status koneksi internet personal kepada unlimited speedy telkom. Akan tetapi perubahan status koneksi internet pada tingkat unlimited sudah menjadi kebutuhan seknas ASPPUK untuk mengakomodasi layanan website yang berbasis e-commerce yang membutuhkan koneksi yang lebih stabil dan cepat.

### *E.3. Monitoring JARPUK*

Monitoring secara teratur dilakukan ASPPUK (baik melalui seknas maupun sekwil) setiap 6 bulan. Sebelum monitoring dilakukan, setiap LKP wajib mengirim laporan kepada seknas ASPPUK (dan di tembuskan ke ASPPUK wilayah) setiap tiga bulan. Dari laporan tersebut, perkembangan LKP dan JARPUK secara tertulis terlihat. Disamping itu, monitoring juga dilakukan Komite eksekutif Nasional dan ASPPUK wilayah – dalam setiap forum wilayah -- setiap satu tahun sekali.

Hasil monitoring terlihat bahwa LKP dan JARPUK masih dalam proses pembenahan dan LKP memiliki potensi besar sebagai penguatan ekonomi, tetapi rawan terjadi *elitisasi*. Untukantisipasi dan mengatasi masalah diatas - ASPPUK secara tertulis menerbitkan panduan konsep LKP untuk dibagikan kepada NGO anggota dan menjelaskan tentang landasan dasar, mekanisme-prosedur serta sasaran LKP

### *E.4. Monitoring Ornop Anggota*

Secara menyeluruh monitoring Sekretariat nasional ASPPUK kepada NGO anggota dan JARPUK dilakukan setiap tahun. Dalam melakukan monitoring, seknas dibantu sekretaris wilayah maupun Komite Eksekutif Wilayah. Monitoring khususnya untuk melihat keaktifan anggota dalam pendampingan PUK, dan untuk memantau kelanjutan program nasional, seperti *gender budget*.

Dari monitoring diketahui bahwa anggota yang kurang aktif belum menunjukkan perkembangan, oleh karenanya di wilayah NT dan Jawa mereka mendapatkan sanksi. Beberapa JARPUK memiliki kemampuan advokasi melebihi anggota/NGO pendamping dan ada kecenderungan merasa tidak puas dan menuntut dilakukan pendampingan intensif. Ketidakpuasan JARPUK tersebut dimanifestasikan dalam bentuk surat pengaduan – oleh JARPUK dari Jawa dan Sulawesi kepada Sekretariat ASPPUK Nasional. Mekanisme pengaduan ini sebenarnya belum pernah disepakati, tetapi mereka memiliki pemahaman bahwa kewenangan untuk melakukan kontrol pada NGO pendamping ada di tataran Sekretariat nasional.

#### *E.5. Pengembangan Konsep LKP*

Sebagai penanggung jawab nasional atas keberlangsungan LKP di sejumlah kabupaten, sekretariat nasional diberi amanat untuk membangun konsep Lembaga Keuangan Perempuan. Konsep LKP sebenarnya sudah terbangun semenjak LKP mulai berdiri di tahun 2002. Namun dalam perkembangannya hal itu banyak menemui problematika yang harus disesuaikan dengan tuntutan kondisi.

Untuk menghadapi itu pada tahun 2005, sekretariat nasional beserta Tim kecil – sebagian yang pernah menggagas berdirinya LKP – mengadakan lokakarya terbatas untuk membahasnya. Sejumlah ide terungkap, yaitu berupa rekomendasi kepada sekretariat nasional diamanatkan untuk menyelesaikan konsep LKP terbaru, berdasarkan kerangka yang disusun Tim kecil. Kini, konsep LKP sudah disusun dengan berdasarkan hasil rekomendasi dengan menuangkan sejumlah hal baru, seperti peran masing-masing komponen (seperti ASPPUK nasional, Ornop Pendamping, dan JARPUK). Namun kemudian, pada tahun 2008 konsep tersebut dikembangkan kembali oleh Seknas dan KEN untuk menyempurnakan konsep LKP dengan kemungkinan pembentukan LKP nasional di tingkat Seknas. Konsep tersebut menjadi bahan workshop refleksi LKP yang akan direncanakan pada tahun 2009.

#### *E.6. Konsolidasi Internal berupa Perencanaan Strategis Nasional*

Perencanaan Strategis dilaksanakan bersamaan dengan FORNAS ASPPUK, kegiatan ini dimaksudkan sebagai media konsolidasi kekuatan ASPPUK sebagai Jaringan NGO untuk pengembangan usaha kecil-mikro dan fasilitator gerakan masyarakat sipil. Melalui Perencanaan Strategis dapat dilakukan refleksi kekuatan dan kelemahan ASPPUK sebagai elemen jaringan, dan oleh karenanya mampu dirumuskan kebijakan dan agenda strategis ASPPUK tahun 2008-2011.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Pebruari 2008. Workshop dihadiri 38 orang anggota ASPPUK dari 5 wilayah, Dari 47 orang NGO yang harusnya. Selain anggota ASPPUK hadir pula perwakilan JARPUK dari 5 wilayah, KEN, KEW dan SEW yang sebagian juga mewakili anggota serta para Pendiri dan staf Seknas. Kegiatan Workshop dilaksanakan selama 5 hari efektif, 12-16 Pebruari 2008.

Kegiatan dilakukan dengan proses awal, berupa refleksi perkembangan PUK dan kelembagaan ASPPUK di masing-masing wilayah, ada masukan dari 3 narasumber sebelum peserta berdiskusi untuk menyusun perencanaan strategis ASPPUK. Kegiatan diakhiri dengan penyepakatan kebijakan antara lain kelembagaan, pembagian peran dan tanggung jawab antara NGO, PNGO dan FNGO serta perumusan strategi bersama. Nara sumber dan materi yang disampaikan berjumlah 3 orang, yakni: pertama, Ernawati Chotim memberikan masukan tentang model Gerakan PUK dan Pengembangan Usaha Kecil yang efektif. Kedua, Dina Lumban Tobing memberikan masukan tentang Gender Mainstream, berdasarkan hasil asistensi gender tracking di 2 anggota ASPPUK. Ketiga, Hendro Sangkoyo; memberikan masukan tentang model gerakan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan berdasarkan pengamatan sekilas pada model gerakan JarPUK di Pacitan, Sukoharjo dan Surabaya.

Berikut ini hasil kesepakatan nasional antara lain :

- Adanya kesediaan anggota untuk menjalankan fungsi pendampingan pada PUK dengan memperhatikan analisis sosial yang lebih komprehensif, dengan pendekatan ekonomi politik.
- ASPPUK lebih memperkuat diri dalam mandatnya sebagai pendamping Usaha Kecil-mikro.
- Adanya kesediaan anggota untuk memperbaiki kinerja kelembagaan menuju lembaga yang akuntabel, melalui penegakan kode etik.
- Tersusun Kode etik ASPPUK dan lembaga penegakannya (MPO).
- Mempertegas proses desentralisasi dengan penyusunan konsep yang lebih aplikabel.

Selain perencanaan strategis di tingkat nasional, terdapat pula perencanaan strategis lain, yaitu, diantaranya;

- Rapat Pengurus ASPPUK, yang diikuti KEN (Komite Eksekutif Nasional), KEW (Komite Eksekutif Wilayah), SEN (Sekretaris Eksekutif Nasional), SEW (sekretaris Eksekutif Wilayah) diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- Pertemuan pengurus KEN dengan SEN minimal 6 (enam) bulan sekali.
- Forum Wilayah yang dihadiri oleh setiap Ornop anggota yang ada di wilayah masing-masing, diadakan setiap satu tahun sekali.

#### *E.7. Penyusunan Kode Etik ASPPUK*

Sebagai rekomendasi dari FORNAS 2008, pengurus ASPPUK – tepatnya MPO (majelis pertimbangan organisasi) – diminta untuk menyusun kode etik yang bisa menjadi landasan untuk keberlanjutan lembaga, baik dari sisi akuntabilitas dan etika jaringan. Berdasarkan hal itu, bersama dengan KEN dan SEN, MPO menyusun draft kode etik dalam bentuk pertemuan kecil. Pertemuan untuk menyusun draft kode etika berlangsung di sekretariat nasional ASPPUK pada November 2008.

Dalam diskusi tersebut direkomendasikan untuk MPO untuk melihat pedoman etik yang pernah tersusun oleh lembaga lain. Dalam hal itu, MPO mengambil referensi dari instrumen seperti: pedoman perilaku KPMM, TANGO, PCNC Philippines, Kode Etik

LSM Indonesia, Tim perumus kode etik ASPPUK merumuskannya. Hasil perumusan ini nantinya menjadi acuan MPO untuk menyusun draft kode etik ASPPUK yang akan didiskusikan di dalam workshop pada tahun 2009.

## **F. Jaringan Kerja**

Berikut ini, mitra dan jaringan kerja ASPPUK;

TDH	Terre Dos Home, Belanda
NZAID	New Zeland Embassy
Hivos	Belanda
Ford Foundation	Amerika Serikat
OXFAM	Inggris
KIKIS	Kelompok Kerja Indonesia untuk Penganggulangan Kemiskinan Struktural
Pokja Akuntabilitas	Kelompok kerja untuk peningkatan akuntabilitas LSM
JANPUKM	Jaringan nasional Pengembangan Usaha Kecil-Menengah
E-net For Justice Indonesia	Jaringan Pendidikan untuk Keadilan
GERAK LAWAN	Gerakan untuk Menentang UU Penanaman Modal

## **G. Penutup**

Tantangan yang dihadapi ASPPUK dan JARPUK di tahun 2008 datang dari internal dan eksternal. Secara internal, meskipun telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, namun reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten dan propinsi masih lambat dan jauh dari harapan. Sehingga pelayanan dan upaya penjejahteraan rakyat miskin termasuk perempuan di basis melambat. Dalam hal itu, upaya penguatan JARPUK oleh ASPPUK merupakan pekerjaan yang harus berkelanjutan. Selain itu, secara eksternal anggota JARPUK sebagai pengusaha mikro mendapat pengaruh dari krisis global yang menjadi salah satu sebab naiknya harga minyak dunia. Ke depan tantangan tersebut masih akan menghiasi kinerja JARPUK dan ASPPUK. Mudah-mudahan semua rintangan bisa terlampaui dan menjadi bekal berharga untuk bangkit...semoga..

**Lampiran**

**ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL**

**Neraca**

**Per 31 Desember 2008**

**(Dalam Rupiah)**

**AKTIVA**

**AKTIVA LANCAR**

Kas dan setara kas	1,705,524,803
Piutang Kredit Mikro	333,651,800
Piutang ASPPUK Wilayah (LKP)	1,204,941,250
Piutang Karyawan	3,599,035

**Jumlah Aktiva  
Lancar**

**3,247,716,888**

**AKTIVA TIDAK LANCAR**

Harga Perolehan	178,738,700
Akumulasi Penyusutan	(154,372,325)
Nilai Buku	<b>24,366,375</b>

**JUMLAH AKTIVA**

**3,272,083,263**

**KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH**

**KEWAJIBAN**

Hutang Donor	161,783,975
Hutang Tabungan Solidaritas	32,735,755
Hutang Pada Lembaga Lain	381,467,100
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7,829,760

**Jumlah  
Kewajiban**

**583,816,590**

**AKTIVA BERSIH**

Aktiva Bersih Awal Tahun	1,222,696,309
Perubahan Aktiva Bersih	1,465,570,364

**Jumlah Aktiva  
Bersih**

**2,688,266,673**

**JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH**

**3,272,083,263**

